

Analisis Penguatan Pendidikan Karakter Bangsa dalam Kurikulum dan Model Pembelajaran Lembaga Pendidikan Tinggi Organisasi Masyarakat Islam Indonesia

Sri Murhayati^a

Fakultas Tarbiyah dan Keguruab Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim
Riau

sri.murhayati@uin-suska.ac.id

Lies Andriani^b

Fakultas Tarbiyah dan Keguruab Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim
Riau

lies.andriani@uin-suska.ac.id

Ade Irma^c

Fakultas Tarbiyah dan Keguruab Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim
Riau

ade.irma@uin-suska.ac.id

Pendahuluan

Organisasi Masyarakat Islam mempunyai pengikut (ummat) yang tak terbilang banyaknya di seantero Indonesia, dari Sabang sampai Merauke dengan perkiraan jumlah sekitar 60% penduduk Indonesia. Sehingga dapat dikatakan bahwa Organisasi Masyarakat Islam tersebut telah mempunyai kader-kader yang potensial, baik dalam bidang politik, ekonomi, maupun pendidikan.

Beberapa penelitian menyatakan bahwa Organisasi Masyarakat Islam memiliki keragaman dan karakter yang khas, baik dari segi pemikiran maupun gerakan. Konflik, ketegangan, pertikaian, dialog, maupun harmonisasi di antara mereka, merupakan bagian dari keragaman itu (Buletin The Wahid Institute, 2003). Dari aspek kuantitas anggota dan amal usahanya, Organisasi Masyarakat Islam tersebut memiliki potensi yang sangat dahsyat bila bersinergi bersama dalam memecahkan persoalan-persoalan besar yang sedang dihadapi oleh bangsa kita, seperti menanggulangi krisis akhlak, korupsi, narkoba, perjudian, kemiskinan, ketidakadilan, kebodohan dan sebagainya yang juga dapat kita lihat melalui bidang pendidikan yang diselenggarakannya. Dan melalui jaringan pendidikan inilah Organisasi Masyarakat Islam memimpin kesadaran berbangsa.

Di tahun 2017 ini, terbit Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Nomor 2/2017. Hal ini didasari oleh karena nilai-nilai kebangsaan di masyarakat sedang berkurang akibat munculnya ormas anti-Pancasila. Hal ini sangat menjadi kekhawatiran atas keutuhan NKRI. Intoleransi menjadi masalah utama di masyarakat akhir-akhir ini. Mayoritas bangsa ini merasakan dan melihat fenomena ini hingga menimbulkan kekhawatiran yang

mendalam. Indonesia dalam membangun perjuangannya mengalami gempuran yang datang justru dari rakyatnya sendiri yang terpengaruh oleh pemikiran radikal yang kemudian menolak atau anti-Pancasila. (<https://news.detik.com/berita/d-3552074/14>)

Mencermati fenomena di atas, penulis tertarik untuk meneliti tentang keberadaan organisasi kemasyarakatan Islam dalam penyelenggaraan pendidikan. Apakah penyelenggaraan pendidikan organisasi kemasyarakatan Islam tersebut dapat membantu pemerintah dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui upaya penguatan pendidikan karakter bangsa dalam kurikulum dan model pembelajarannya.

Penguatan Pendidikan Karakter Bangsa

Karakter menurut Pusat Bahasa Depdiknas adalah, bawaan, hati, jiwa, kepribadian, budi pekerti, perilaku, personalitas, sifat tabiat, temperamen dan watak. Karakter merupakan nilai-nilai perilaku manusia yang berhubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama manusia, lingkungan, dan kebangsaan yang terwujud dalam pikiran, sikap, perasaan, perkataan, dan perbuatan berdasarkan norma-norma agama, hukum, tata krama, budaya, dan adat istiadat. (Sudirman N, 1992)

Pendidikan karakter adalah pendidikan untuk membentuk kepribadian seseorang melalui pendidikan budi pekerti, yang hasilnya terlihat dalam tindakan nyata seseorang yaitu tingkah laku yang baik, jujur, bertanggung jawab, menghormati hak orang lain, kerja keras, dan sebagainya. (Abdullah Munir, 2010)

Penguatan pendidikan karakter bangsa merupakan salah satu program prioritas Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla sesuai dengan Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Pasal 3, yang menyebutkan bahwa :

“Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk karakter serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan nasional bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”.

Sehubungan dengan ini Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy menekankan bahwa gerakan Penguatan Pendidikan Karakter sebagai fondasi dan ruh utama pendidikan. Dalam penerapannya, dilakukan sedikit modifikasi intrakurikuler agar lebih memiliki muatan pendidikan karakter. Kemudian ditambahkan kegiatan dalam kokurikuler dan ekstrakurikuler. Integrasi

ketiganya diharapkan dapat menumbuhkan budi pekerti dan menguatkan karakter positif anak didik.

Pendidikan karakter bertujuan untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan dan hasil pendidikan yang mengarah pada pencapaian pembentukan karakter dan akhlak mulia peserta didik secara utuh, terpadu, dan seimbang, sesuai standar kompetensi lulusan. Melalui pendidikan karakter diharapkan peserta didik mampu secara mandiri meningkatkan dan menggunakan pengetahuannya, mengkaji dan menginternalisasi serta mempersonalisasi nilai-nilai karakter dan akhlak mulia sehingga terwujud dalam perilaku sehari-hari.

Terdapat lima nilai karakter utama yang bersumber dari Pancasila, yang menjadi prioritas pengembangan gerakan Penguatan Pendidikan Karakter yaitu religius, nasionalisme, integritas, kemandirian, dan kegotongroyongan. Masing-masing nilai tidak berdiri dan berkembang sendiri-sendiri tetapi saling berinteraksi satu sama lain, berkembang secara dinamis, dan membentuk keutuhan pribadi.

Kemendiknas memberikan beberapa rekomendasi prinsip untuk mewujudkan pendidikan karakter yang efektif sebagai berikut :

- a. Mempromosikan nilai-nilai dasar etika sebagai basis karakter
- b. Mengidentifikasi karakter secara komprehensif supaya mencakup pemikiran, perasaan dan perilaku
- c. Menggunakan pendekatan yang tajam, proaktif dan efektif untuk membangun karakter.
- d. Menciptakan komunitas sekolah yang memiliki kepedulian.
- e. Memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menunjukkan perilaku yang baik;
- f. Memiliki cakupan terhadap kurikulum yang bermakna dan menantang yang menghargai semua peserta didik, membangun karakter mereka, dan membantu mereka untuk sukses.
- g. Mengusahakan tumbuhnya motivasi diri pada para peserta didik.
- h. Memfungsikan seluruh staf seluruh staf sekolah sebagai komunitas moral yang berbagi tanggung jawab untuk pendidikan karakter dan setia pada nilai dasar yang sama.
- i. Adanya pembagian kepemimpinan moral dan dukungan luas dalam membangun inisiatif pendidikan karakter.
- j. Memfungsikan keluarga dan anggota masyarakat sebagai mitra dalam usaha membangun karakter.
- k. Mengevaluasi karakter sekolah, fungsi staf sekolah sebagai guru-guru karakter, dan manifestasi karakter positif dalam kehidupan peserta didik.. (Ari Gunanjar Agustian, 2006)

Penguatan Pendidikan Karakter merupakan pintu masuk untuk melakukan pembenahan secara menyeluruh terhadap pendidikan. Hal ini menjadi tanggung

jawab suatu lembaga pendidikan formal yang mempunyai suatu muatan beban yang cukup berat dalam melaksanakan misi pendidikan tersebut. (Departemen Agama, 2001), Penguatan Pendidikan Karakter mendorong sinergi tiga pusat pendidikan, yaitu sekolah, keluarga dan masyarakat.

Organisasi Masyarakat Islam Indonesia dan Pendidikan

Organisasi Masyarakat adalah wadah bagi para anggota masyarakat yang ingin bersatu sesuai dengan keinginan dan cita-cita dibidang masing-masing. Setiap orang atau sekelompok orang yang mempunyai hasrat dan minat yang sama pada suatu hal ada disitu, yaitu organisasi masyarakat. Nama organisasi masyarakat memang terkesan gahar dan membanggakan bagi seseorang yang ikut didalamnya.

Ada beberapa nama organisasi masyarakat Islam di Indonesia, di antaranya Syarikat Islam (SI), Al-Irsyad. Al Washliyah, Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII), Dewan Masjid Indonesia (DMI), Forum Umat Islam (FUI), Front Pembela Islam (FPI), Forum , Dakwah Islam Indonesia (FDII), Harakah Sunniah Untuk Masyarakat Islami (Hasmi), Hidayatullah, Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), Ikatan Da'i Indonesia (Ikadi), Lembaga Dakwah Kemuliaan Islam (LDKI), Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII), Majelis Intelektual dan Ulama Muda Indonesia (MIUMI), Majelis Az Zikra, Majelis Dakwah Islamiyah, Majelis Ulama Indonesia (MUI). Majelis Tafsir Al-Quran (MTA), Mathla'ul Anwar, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama (NU), Nahdlatul Wathan (NW), Pemuda Muslimin Indonesia, Persatuan Islam (Persis), Persatuan Islam Tionghoa Indonesia (PITI), Persatuan Ummat Islam (PUI), Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Perti), Wahdah Islamiyah, Al-Ittihadiyah dan BP41.

Keterlibatan atau partisipasi masyarakat dalam pendidikan di Indonesia bukanlah hal yang baru. Ini telah dilaksanakan oleh yayasan-yayasan swasta, kelompok sukarelawan, organisasi-organisasi non-pemerintah, dan bahkan oleh perseorangan (Suyata, 1996). Di kalangan masyarakat Muslim Indonesia, partisipasi masyarakat dalam rangka pendidikan berbasis masyarakat telah dilaksanakan lebih lama lagi, yaitu setua sejarah perkembangan Islam di bumi Nusantara. (Azyumardi Azra, 2002)

Secara integral pendidikan berbasis masyarakat adalah pendidikan yang membuka akses kepada masyarakat untuk berperan dalam penyelenggaraan pendidikan. Antara lain meliputi peran serta perorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi masyarakat dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan. (H. A. R. Tilaar, 2000)

Dalam Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional tentang Pendidikan Berbasis Masyarakat yaitu penyelenggaraan pendidikan berdasarkan kekhasan agama, social, budaya, aspirasi

dan potensi masyarakat sebagai perwujudan pendidikan dari, oleh dan untuk masyarakat. (Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003)

Pendidikan dari masyarakat artinya bahwa pendidikan haruslah memberikan jawaban kepada kebutuhan (needs) dari masyarakat sendiri. Jadi, pendidikan bukan dituangkan dari atas, dari kepentingan pemerintah semata-mata apalagi dari pengusaha, tetapi pendidikan yang tumbuh dari masyarakat sendiri dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat itu sendiri.

Pendidikan oleh masyarakat artinya bahwa masyarakat bukanlah merupakan suatu objek pendidikan yaitu untuk melaksanakan kemauan Negara atau suatu kelompok semata-mata tetapi partisipasi aktif dari masyarakat, di mana masyarakat mempunyai peranan di dalam setiap langkah program pendidikannya. Pendidikan oleh masyarakat bukan artinya melepaskan tanggung jawab pemerintah. Tugas pemerintah di dalam pendidikan nasional adalah menjaga dan mengarahkan agar supaya tanggung jawab masyarakat dapat berjalan sebagaimana mestinya. Kalau perlu pemerintah dapat mengulurkan tangan untuk memecahkan masalah-masalah yang memang meminta intervensi pemerintah.

Pendidikan bersama-sama masyarakat artinya masyarakat diikutsertakan di dalam program-program pemerintah yang telah mendapatkan persetujuan masyarakat karena lahir dari kebutuhan nyata dari masyarakat itu sendiri. (H. A. R. Tilaar, 2000)

Adapun tujuan utama pendidikan berbasis masyarakat adalah:

1. Membantu pemerintah dalam memobilisasi sumber daya lokal dan meningkatkan peran serta masyarakat untuk mengambil bagian yang lebih besar dalam perencanaan dan pendidikan pada semua tingkat, jenis dan jalur pendidikan.
2. Merangsang terjadinya sikap dan persepsi tentang rasa kepemilikan masyarakat terhadap sekolah, rasa tanggung jawab, kemitraan, toleransi dan kekuatan multicultural
3. Mendukung prakarsa pemerintah dalam meningkatkan dukungan masyarakat terhadap sekolah, khususnya orang tua dan masyarakat melalui kebijakan desentralisasi
4. Mendukung peranan masyarakat untuk mengembangkan inovasi kelembagaan untuk melengkapi, meningkatkan dan mengganti peran persekolahan dan untuk meningkatkan mutu dan relevansi, penyediaan akses yang lebih besar, peningkatan efisiensi manajemen pendidikan dasar dan menengah.
5. Membantu mengatasi putus sekolah khususnya dari pendidikan dasar. (A. Malik Fajar, 1999)

Ada lima aspek dalam mengembangkan dan melaksanakan konsep pendidikan berbasis masyarakat, yaitu :

1. Teknologi yang dipelajari hendaknya sesuai dengan situasi dan kondisi nyata yang ada di masyarakat. Teknologi canggih yang diperkenalkan dan adakalanya dipaksakan sering berubah menjadi pengkarbitan masyarakat yang akibatnya tidak digunakan sebab kehadiran teknologi itu bukan karena dibutuhkan, melainkan karena dipaksakan. Hal ini membuat masyarakat menjadi rapuh.
2. Kelembagaan, artinya harus wadah yang statusnya jelas dimiliki atau dipinjam, dikelola, dikembangkan oleh masyarakat. Di sini digugah dan ditumbuhkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pengadaan, penggunaan dan pemeliharaan lembaga pendidikan luar sekolah.
3. Sosial, artinya program belajar harus bernilai sosial atau harus bermakna bagi kehidupan peserta didik atau warga belajar. Oleh karena itu program harus digali berdasarkan potensi lingkungan dan orientasi pasar, bukan berorientasi akademik semata.
4. Kepemilikan program belajar, artinya kelembagaan harus menjadi milik masyarakat, bukan milik instansi pemerintah. Selama ini terbukti rasa memiliki oleh instansi pemerintah tidak mampu membangkitkan partisipasi masyarakat, yang ada hanyalah pemaksaan program, dalam arti semuanya dirancang oleh instansi bersangkutan.
5. Organisasi, artinya aparat pendidikan luar sekolah tidak menangani sendiri programnya, melainkan bermitra dengan organisasi-organisasi kemasyarakatan. Organisasi inilah yang akan menjadi pelaksana dan mitra masyarakat dalam memenuhi kebutuhan belajar mereka dan berhubungan dengan sumber-sumber pendukung program. (Fasli Jalal, Dedi Supriadi, 2001)

Metodologi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di lembaga pendidikan tinggi organisasi masyarakat Islam Indonesia yaitu Universitas Islam Makassar, Universitas Muhammadiyah Makassar, Universitas Nahdhatul Ulama Indonesia, Universitas Muhammadiyah Jakarta.

Sesuai dengan tujuan penelitian ini, instrumen penelitian yang digunakan adalah dokumen kurikulum pembelajaran lembaga pendidikan tinggi organisasi masyarakat Islam Indonesia dengan teknik analisa isi untuk melihat penguatan pendidikan karakter bangsa dalam kurikulum pembelajaran lembaga pendidikan tinggi organisasi masyarakat Islam Indonesia.

Hasil Penelitian

Universitas Muhammadiyah Makasar

No	Capaian Pembelajaran	Penguatan Pend. Karakter
1	Bertindak sesuai dengan norma agama, hukum, sosial dan kebudayaan nasional	Religius, nasionalis, integritas
2	Menunjukkan pribadi yang dewasa dan teladan	Mandiri, integritas.
3	Etos kerja, tanggung jawab yang tinggi	Mandiri
4	Bersifat inklusif, bertindak obyektif serta tidak diskriminatif	Gotong royong, integritas.
5	Pola komunikasi yang baik dan santun dengan masyarakat	Gotong royong, integritas.
6	Menyesuaikan diri di tempat tugas	Gotong royong

Universitas Islam Makassar

No	Capaian Pembelajaran	Penguatan Pend. Karakter
1	Menjadi pribadi yang unggul berdaya saing, profesional, dan berkarakter kebangsaan sesuai ajaran Islam <i>Ahlussunnah Wal Jamaah An Nahdliyah</i> .	Religius, nasionalis, integritas, mandiri, gotong royong.
2	Mengembangkan Ilmu Pengetahuan dengan tetap berlandaskan ajaran Islam <i>Ahlussunnah Wal Jamaah An-Nahdliyah</i> .	Religius, Mandiri, integritas.
3	Ikut serta dalam kehidupan sosial dan kemasyarakatan.	Gotong royong, integritas.
4	Bekerjasama dengan lembaga lain untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia	Gotong royong, integritas.
5	Integrasi ilmu pengetahuan dengan ajaran Islam <i>Ahlussunnah Wal Jamaah An-Nahdliyah</i> secara dinamis	Religius, integritas.

Universitas Nahdhatu Ulama Indonesia Jakarta

No	Capaian Pembelajaran	Penguatan Pend. Karakter
1	Berkontribusi dalam mengamalkan nilai-nilai Ahlussunnah Wal Jama'ah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara demi menjaga kohesifitas sosial antar elemen bangsa Indonesia	Religius, nasionalis, integritas, mandiri, gotong royong.
2	Menginternalisasikan nilai Ahlussunnah Wal Jama'ah sebagai landasan norma dan etik	Religius, nasionalis, integritas.

3	pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni budaya;	integritas, mandiri
4	Mempromosikan kejujuran, kepercayaan, keadilan, penghormatan dan tanggung jawab;	integritas, mandiri, gotong royong
5	Mengabdikan kepada komunitas atau publik masyarakat mereka, menunjukkan rasa tanggung jawab kepada komunitas atau publik yang lebih luas;	gotong royong, nasionalis
6	Mampu berkomunikasi secara efektif dan penuh hormat dengan individu-individu dari latar belakang yang berbeda dalam masyarakat multikultural; Mampu bekerja, berkomunikasi, dan bergaul dengan orang lain secara efektif dengan menggunakan media yang sesuai dan tepat.	integritas, mandiri, gotong royong

Universitas Muhammadiyah Jakarta

No	Capaian Pembelajaran	Penguatan Pend. Karakter
1	Berakhlak mulia, cakap mandiri, berguna bagi masyarakat dan Negara, beramal menuju masyarakat utama, adil dan makmur yang diridhoi Allah SWT	Religius, nasionalis, integritas, mandiri, gotong royong
2	Mengembangkan ilmu keislaman untuk membangun masyarakat madani dalam wadah Negara kesatuan republik Indonesia	Religius, nasionalis, integritas, mandiri, gotong royong
3	Aktif menyelesaikan permasalahan masyarakat melalui penelitian dan pengabdian masyarakat	integritas, mandiri, gotong royong
4	Memertinggi pendidikan karakter islami sesuai dengan nilai al-Islam kemuhammadiyah	Religius, mandiri, integritas

Kesimpulan

Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Tinggi Organisasi Masyarakat Islam Nahdhatul Ulama dan Muhammadiyah sangat berperan dalam Penguatan Pendidikan Karakter Bangsa yang meliputi unsur utama yaitu religius, nasionalis, mandiri, integritas dan gotong royong sebagaimana yang dicanangkan oleh pemerintah Indonesia demi terwujudnya Negara kesatuan republic Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari profil lulusan dan capaian pembelajaran dalam kurikulum lembaga pendidikan tinggi organisasi masyarakat Islam tersebut.

Daftar Pustaka

- Abdul Majid, *Pendidikan karakter dalam perspektif Islam*, Bandung : Remaja Rosdakarya, 2010.
- Abdullah Munir, *Pendidikan Karakter*, Yogyakarta: Pedagogia, 2010.
- Abin Syamsuddin Makmun, *Psikologi Pendidikan*, Bandung: Rosda Karya Remaja, 2003.
- Abudinata, *Manajemen Pendidikan; Mengatasi Kelemahan Pendidikan Islam di Indonesia*, Prenada Media, Jakarta, 2003.
- , *Tokoh-Tokoh Pembaharuan Pendidikan Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press. 2005.
- Ace Suryadi, *Pendidikan, Investasi SDM dan Pembangunan*, (Jakarta; Balai Pustaka, 2002)
- Ade Suryadi dan H. A. R. Tilaar, *Analisis Kebijakan Pendidikan*, (Bandung: Rosdakarya, 1994)
- Amin Ahmad, *Etika (Ilmu akhlak)*, Jakarta: Bulan Bintang, 1995
- Aulia Reza Bastian, *Reformasi Pendidikan*, (Yogyakarta; Lappera Pustaka Utama, 2002)
- Azzyumardi Azra, *Pendidikan Islam; Tradisi dan Modernisasi Menuju Milinium Baru*, (Jakarta; Logos Wacana Ilmu, 2000)
- Buletin The Wahid Institute, *Peta pemikiran dan Gerakan Islam di Indonesia*, 2003
- Departemen Agama, *Kendali Mutu, Pendidikan Agama Islam* ,Jakarta : Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2001.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Pembinaan Pendidikan Karakter di Sekolah Menengah Pertama* . Jakarta: Kemendiknas 2010.
- Fasli Jalal, Prof. Dr. Dedi Supriadi, *Reformasi Pendidikan dalam Konteks Otonomi Daerah*, (Yogyakarta: Adicita Karya Nusa, 2001)
- Gunanjar Ari Agustian, *Rahasia Membangkitkan emosional Spiritual Quetiont Power*, Jakarta : Arga, 2006.
- Hartono, *Statistik untuk Penelitian*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2008.
- Hasan Langgulung, *Beberapa Pemikiran tentang Pendidikan Islam, al-Ma'arif, Bandung, 1980*.
- Hasan Langgulung, *Manusia dan Pendidikan Suatu Analisa Psikologi dan Pendidikan*, Pustaka Al-Husna, Jakarta, 1986.
- Heri, *Pendidikan Karakter, (Konsep dan Implementasi)*, Bandung : Alfabeta, 2012.
- H. A. R. Tilaar, MSc. Ed., *Pendidikan, Kebudayaan dan Masyarakat Madani Indonesia*, (Bandung: PT. Rosdakarya, 2000)
- J. Supranto, *Teknik Sampling Untuk Survei dan Eksperimen*, Jakarta, PT Rineka Cipta, 1992.
- Malik Fajar, dkk., *Plarform Reformasi Pendidikan Nasional*, (Jakarta : Logos, 1999).
- Muhaimin, *Arah Baru Pengembangan Pendidikan Islam*, Bandung: Nuansa. 2003.

- , dkk., *Paradigma Pendidikan Islam: Upaya mengefektifkan Pendidikan Agama Islam di Sekolah*, Jakarta: Remaja Rosdakarya, cet.1. 2001.
- Muhibbin Syah, *Psikologi Belajar*, Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2008.
- Mulyana, *Kurikulum Berbasis Kompetensi*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003
- Murtadha Muthahhari, *Konsep Pendidikan Islami*, diedit oleh Ahmad Subandi, Iqra Kurnia Gemilang, Jakarta, 2005.
- Paulo Freire, *Pedagogy of the Oppressed*, Penguin Books, 1978.
- Said Aqil Husain Munawar. *Aktualisasi Nilai-nilai Qur'ani*. Ciputat: Ciputat Press. 2005.
- Sam M. Chan, Tuti T. Sam, *Kebijakan Pendidikan Era Otonomi Daerah*, (Jakarta; Raja Grafindo Persada, 2005)
- Shindu Nata, *Menggagas Paradigma Baru Pendidikan Demokratisasi; Otonomi Civil Society Globalisasi*, (Yogyakarta; Kanisus, 2000)
- Steenbrink Karel A, *Pesantren, Madrasah dan Sekolah*. Jakarta: LP3ES. 1974.
- Sudirman N., *Ilmu pendidikan*, Bandung : Remaja Rosdakarya, 1992.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kependidikan; Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2008.
- Tulus Tu'u, *Peran Disiplin pada Perilaku dan Prestasi Siswa*, Jakarta: Grasindo, 2004.
- Trianto, *Pembelajaran Inovatif Berorientasi Konstruktivistik*, Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2009.
- Umberto Sihombing, *Pendidikan Berbasis Masyarakat*, (Jakarta : CV. Multi Guna, 2002)
- Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 2003.
- Virsyia Norla, *Panduan Menerapkan Pendidikan karakter Di sekolah*, Jakarta:Laksana, 2011.
- Yusuf Al-Qardawi, *Pendidikan Islam dan Madrasah al-Banna*, terj. Prof. H. Bustami A. Gani dan Drs. Zainal Abidin Ahmad, Bulan Bintang, Jakarta, 1980.
- Yusufhadi Miarso, *Menyemai Benih Teknologi Pendidikan*, Jakarta: Prenada Media, 2004.
- Zainal Arifin, *Pengembangan Manajemen Mutu Kurikulum Pendidikan Islam*, Yogyakarta: DIVA Press, cet.1. 2012.
- Zakiah Daradjat, *Pembinaan Dimensi Rohaniyah Manusia dalam Pandangan Islam*, Medan, IAIN, 1984.